

LAPORAN BULANAN

BULAN DESEMBER TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950
email : ptun.jakarta@gmail.com | Telepon : (021) 22859672

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	12
BAB III. TELAAHAN	20
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	21

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB II PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprass di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



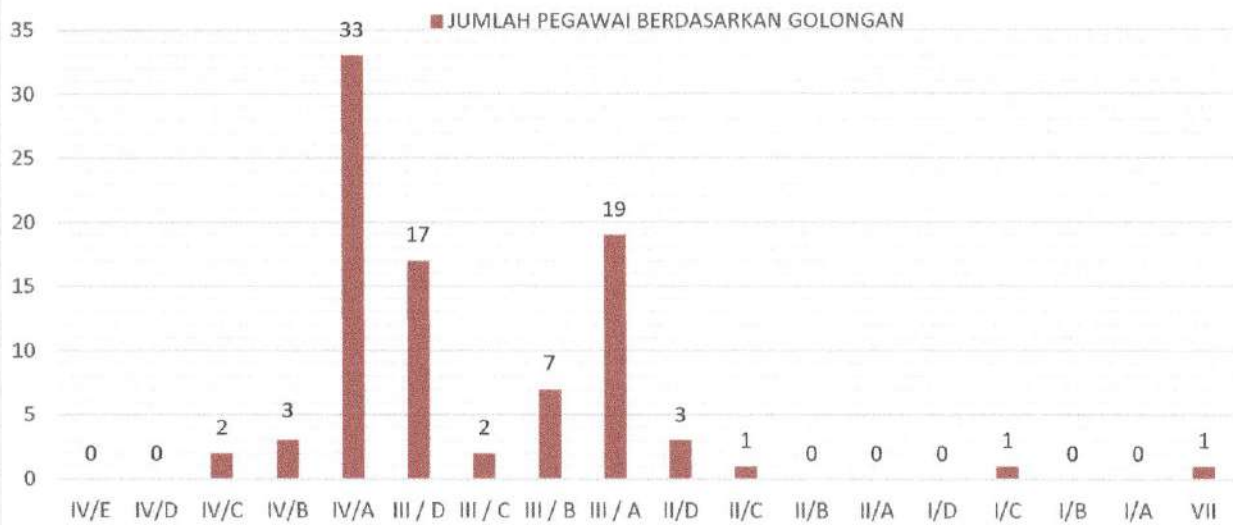
- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 86 Orang, CPNS 2 Orang, PPPK (P3K) dan PPNPN berjumlah 11 Orang, yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 63 orang dan Perempuan 37 Orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.				

Mutasi Keluar Wilayah

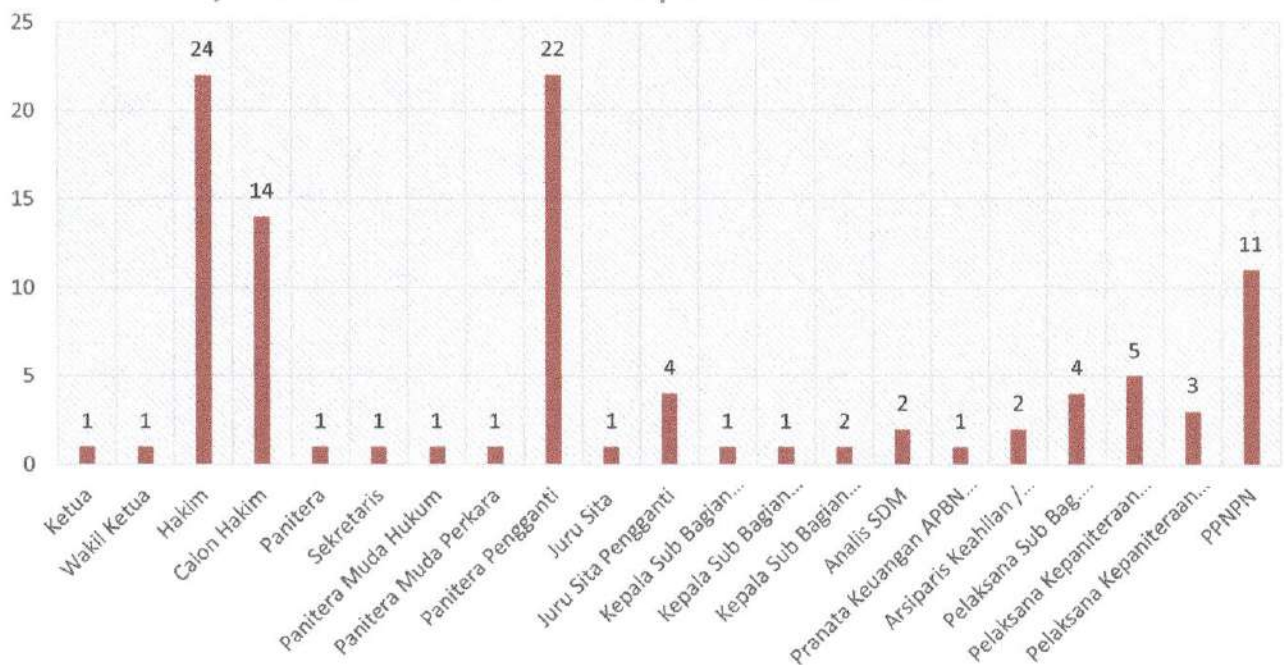
NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Estiningtyas Diana Mandagi, SH, MH	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Surabaya	TMT 9 Desember 2024
2.	Sahibur Rasid, SH, MH	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Serang	TMT 9 Desember 2024

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Pelantikan / Pengangkatan Jabatan Baru :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Junita Angelia Simanungkalit, SH	Jurusita Pengganti PTUN Jakarta	Jurusita PTUN Jakarta	TMT 4 Desember 2024

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			UMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	133	0	0	133
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	31	0	0	31
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	5	0	0	5
4	Kepaniteraan Muda Perkara	128	0	0	128
5	Kepaniteraan Muda hukum	32	0	0	32
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					329

Surat Masuk

NO	SUB.BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1		MAHKAMAH AGUNG RI	1	52	1	54
2		PT.TUN-JAKARTA	6	0	0	6
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	0	0	0	0
4	PERSURATAN	DIRJEND.BADIMILTUN	0	0	0	0
5		KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0
6		PERKARA/LAIN-LAIN	42	0	0	42
7		UMUM/LAIN-LAIN	0	0	0	0
TOTAL					102	

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

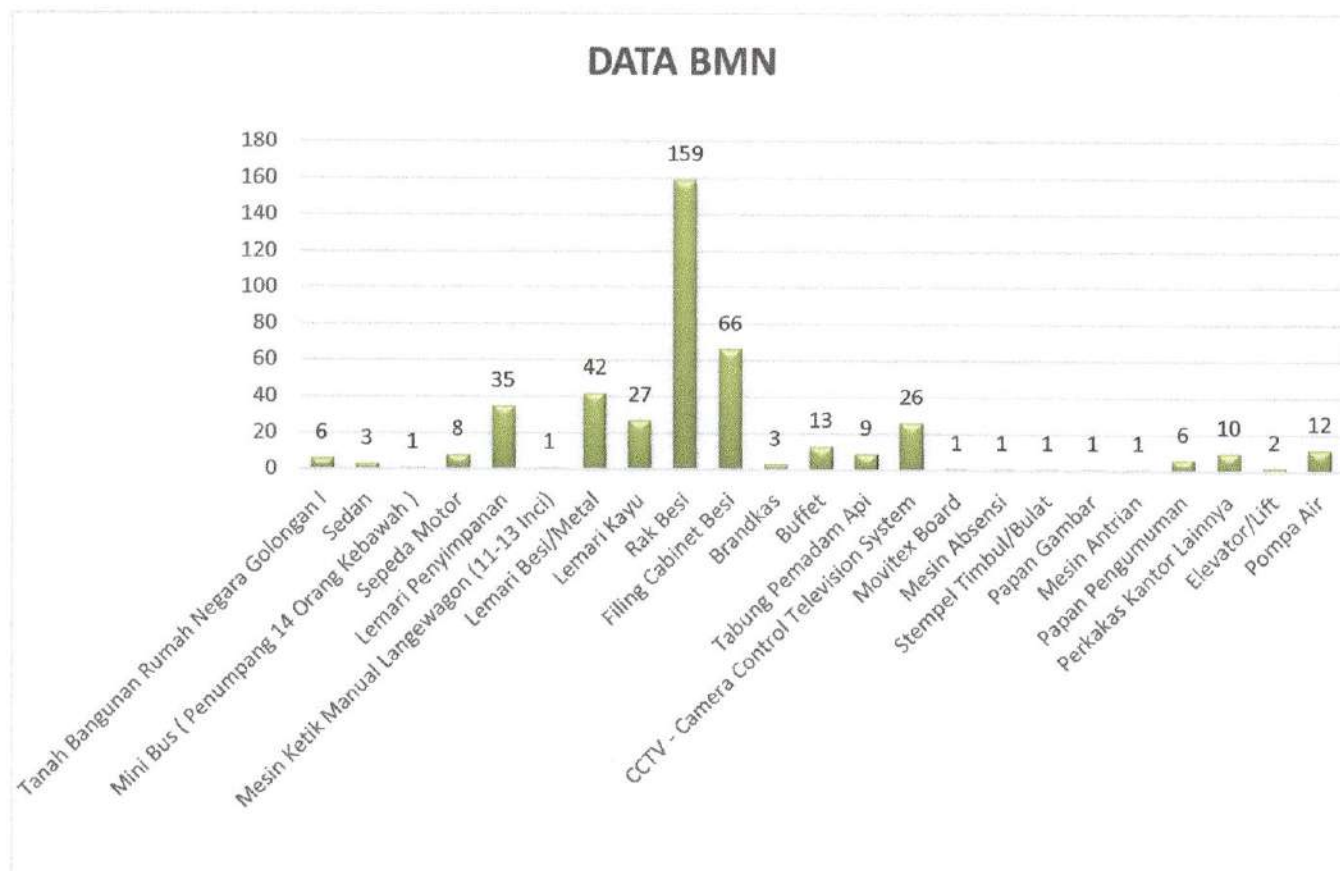
2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

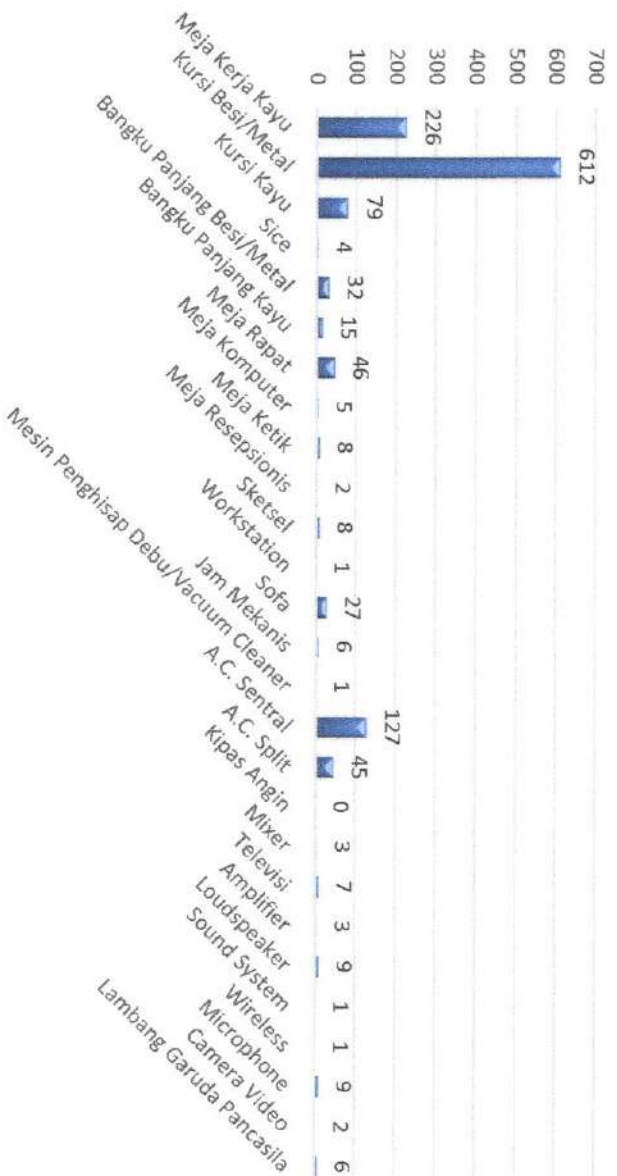
Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

Untuk bulan Desember Tahun 2024 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

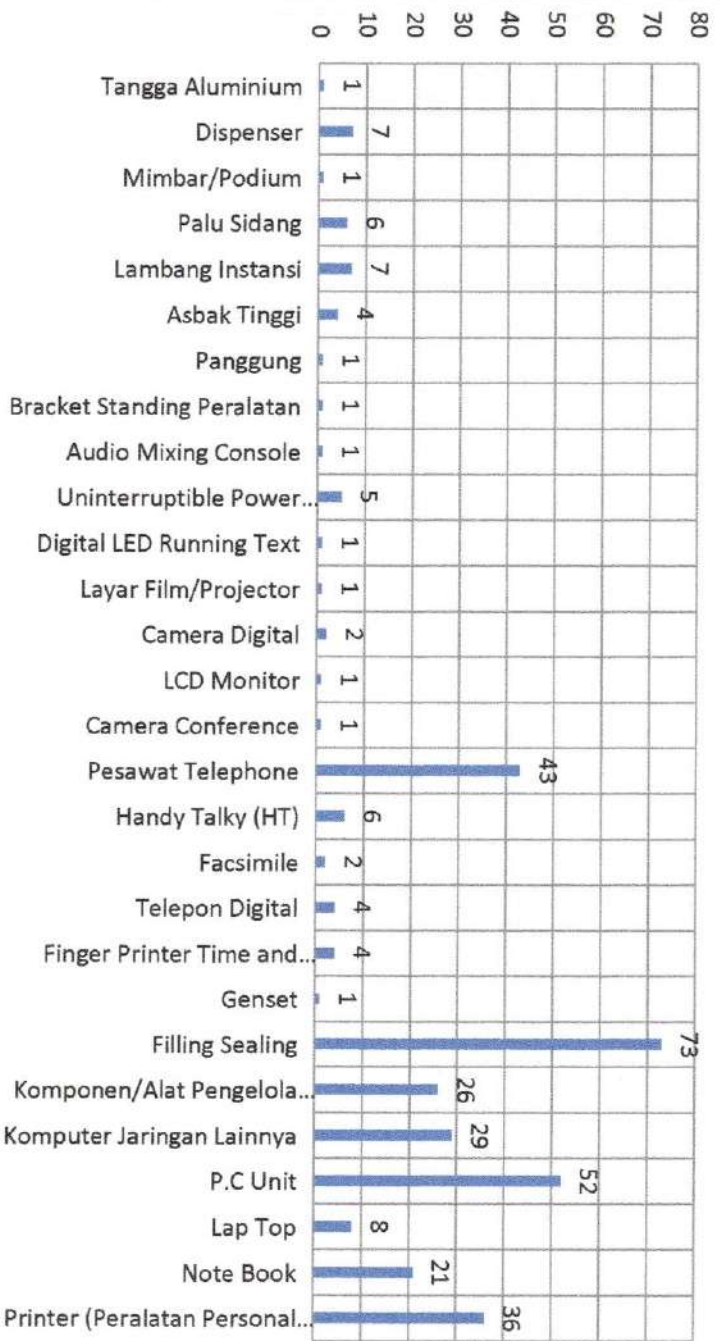


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

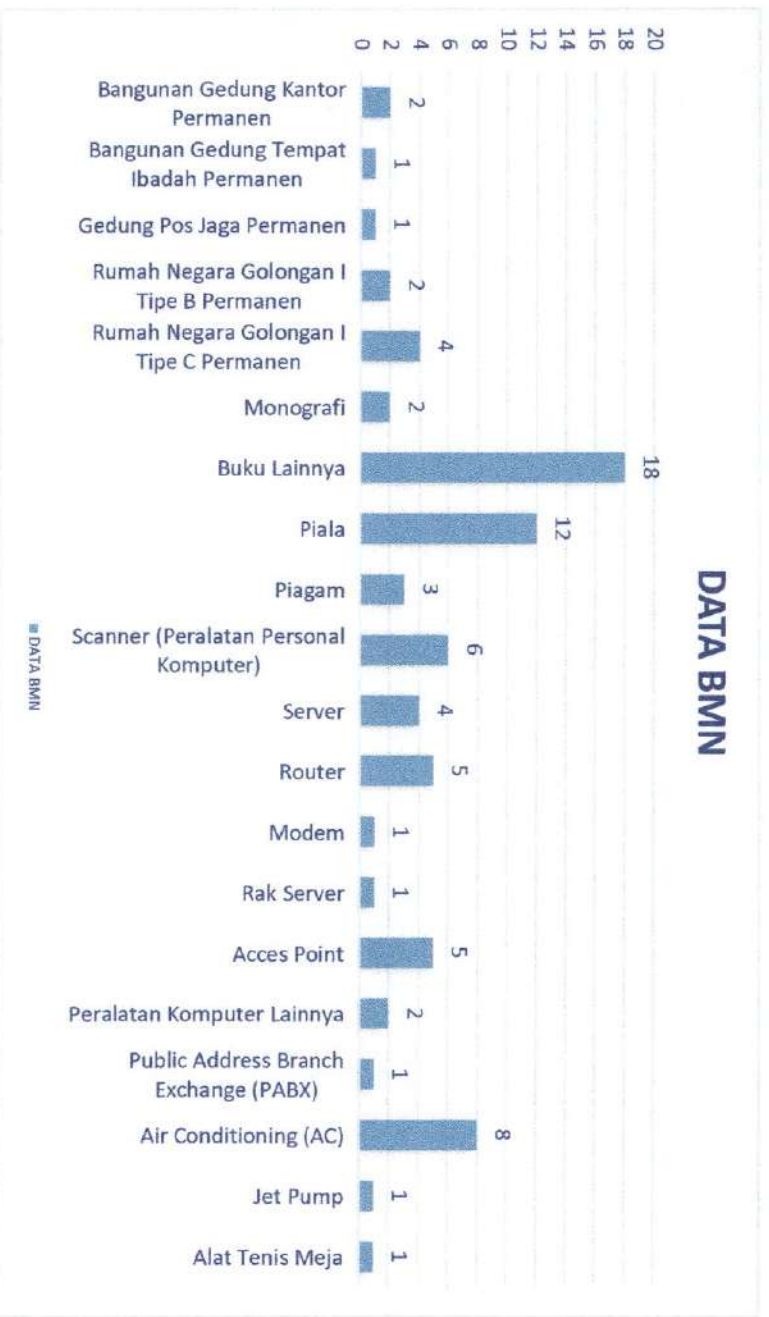
DATA BMN



DATA BMN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Desember 2024 Perpustakaan Pengadlian Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : DESEMBER 2024

SATKER / KODE SATKER : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PRDPRNG : (0100) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (01) BADAN JURUSAN ADMINISTRASI
 No. DIPA : DIPA.005.01.2.526732/2024

No.	KODE	RENS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI		SISA DANA		KET
			PAGU DIPA	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7/4)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11 = (4-9)	12 = (11/4)	13
001	51	BELANJA PEGAWAI	13.935.206.000	13.392.753.326	96%	171.473.506	1%	13.564.226.832	97%	370.929.168	3%	
1066	51111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.043.216.000	4.976.107.180	99%	4.346.200	0%	4.980.453.380	99%	62.762.620	1%	
EBA.994	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	63.000	61.615	98%	5	0%	61.620	98%	1.380	2%	
001.A	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	175.819.000	168.588.074	96%	434.620	0%	169.022.694	96%	6.296.306	2%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	125.377.000	119.063.624	95%	0	0%	119.063.624	95%	6.313.376	5%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43.200.000	40.320.000	93%	0	0%	40.320.000	93%	2.880.000	7%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.129.150.000	6.061.450.000	99%	28.100.000	0%	6.091.550.000	99%	37.600.000	1%	
	511125	Belanja Tunj. Pph PNS	874.004.000	800.488.909	92%	24.324.841	3%	824.813.750	94%	49.190.250	6%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	267.525.000	257.453.100	96%	144.840	0%	257.597.940	96%	4.927.060	2%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	930.053.000	647.146.000	70%	113.421.000	12%	760.567.000	82%	169.486.000	18%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	89.654.000	67.035.000	75%	0	0%	67.035.000	75%	22.619.000	25%	
	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.601.000	39.600.000	100%	0	0%	39.600.000	100%	1.000	0%	
	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.000	944	16%	0	0%	944	16%	5.056	84%	
	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.704.000	0	0%	0	0%	0	0%	3.704.000	100%	
	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.480.000	0	0%	0	0%	0	0%	1.480.000	100%	
	511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	4.900.000	4.900.000	100%	0	0%	4.900.000	100%	0	0%	
	511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	4.054.000	1.013.883	25%	0	0%	1.013.883	25%	3.040.117	75%	
	511626	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	7.325.000	90%	700.000	8%	8.225.000	98%	175.000	2%	
002	52	BELANJA BARANG	2.787.430.000	2.512.315.491	90%	176.241.017	6%	2.688.556.508	96%	98.873.492	4%	
	A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran										
1066	521111	Belanja Keperluan Kantor	726.284.000	670.416.000	92%	57.621.300	8%	728.037.300	100%	1.753.300	0%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	49.923.000	35.132.656	70%	13.455.215	25%	47.587.871	95%	2.335.129	5%	
EBA.994	521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	66.000.000	49.304.487	75%	16.692.600	25%	65.997.087	100%	2.913	0%	
002.A	B	Langganan Daya dan Jasa										
	521111	Belanja Keperluan Kantor	220.690.000	216.140.527	98%	282.935	0%	216.673.462	98%	4.066.538	2%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.640.000	1.961.800	74%	404.000	15%	2.365.800	90%	274.200	10%	
EBA.994	521115	Belanja Honor operasional Satuan Kerja	74.662.000	65.002.000	87%	9.660.000	13%	74.662.000	100%	0	0%	
	522112	Belanja Langganan Telepon	120.000	0	0%	0	0%	0	0%	120.000	100%	
	522113	Belanja Langganan Air	120.000	0	0%	0	0%	0	0%	120.000	100%	
	C	Pemeliharaan Kantor										
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	301.023.000	283.497.500	94%	17.205.000	6%	300.702.500	100%	320.500	0%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45.000.000	44.333.400	99%	0	0%	44.333.400	99%	666.600	1%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	288.908.000	255.250.421	88%	31.425.467	11%	286.675.888	99%	2.232.112	1%	
	D	Operasional Lainnya										
	521111	Belanja Keperluan Kantor	48.750.000	48.750.000	100%	0	0%	48.750.000	100%	0	0%	
	524111	Belanja Perjalanan Rusa	59.200.000	27.646.700	47%	22.124.500	37%	49.771.200	84%	9.428.800	16%	
	524113	Belanja Perjalanan Dalam Kota	150.000	0	0%	0	0%	0	0%	150.000	100%	
	522141	Belanja Sewa	903.960.000	814.680.000	90%	8.370.000	1%	823.050.000	91%	80.910.000	9%	
			16.722.636.000	15.905.068.817	95%	347.714.523	2%	16.252.783.340	97%	469.852.660	3%	



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : DESEMBER 2024

SATKER / KODE SATKER : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 No. DIPA : DIPA-005.05.2.526733/2024

No.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI		SISA DANA		KET
			PAGU DIPA	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7/4)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11 = (4-9)	12 = (11/4)	13
	52	BELANJA BARANG	63.660.000	47.750.000	75%	14.800.000	23%	62.550.000	98%	1.110.000	2%	
AEA.003.051A.5	521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	27.600.000	17.600.000	64%	10.000.000	36%	27.600.000	100%	0	0%	
QCA.001.051A.5	521211	Belanja Bahan (ATK dan Penyediaan berkas perkara)	3.060.000	1.950.000	64%	0	0%	1.950.000	64%	1.110.000	36%	
QCA.001.051A.5	521211	Belanja Bahan (ATK Perbakum)	4.200.000	4.200.000	100%	0	0%	4.200.000	100%	0	0%	
GBA.001.051A.5	522131	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Belanja Jasa Konsultan)	28.800.000	24.000.000	83%	4.800.000	17%	28.800.000	100%	0	0%	
			63.660.000	47.750.000	75%	14.800.000	23%	62.550.000	98%	1.110.000	2%	

Jakarta, Januari 2025
 SEKRETARIS
 GRI WAHYU TOMO, S.Kom.
 NIP. 19840328 200904 1 004

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Desember 2024 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara Professional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 dan Maklumat No. 1 Tahun 2017 supaya kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan terkait Disiplin Pegawai agar berpedoman pada PP 94/2021, PP 11/2017, PERKA BKN 21/2010, 071/KMA/SK/V/2008;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Kasubag Kepegawaian dan Ortala untuk dapat memulai melakukan pembaharuan Surat Keputusan internal Ketua dengan melihat komposisi Hakim dan Pegawai terkini sehingga pada awal tahun 2025 semua program Ketua sudah dapat berjalan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan agar tiap bulan dibuatkan slip gaji bagi setiap Hakim dan Pegawai terkait potongan-potongan gaji yang ada sehingga adanya transparansi;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar tahun depan dibuatkan pin Wiyah Bebas Korupsi (WBK) bagi setiap Hakim dan Pegawai, agar pada tahun 2025 pin tersebut dapat digunakan oleh seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan perihal pengisian SIPP dan MIS agar tanggal dan penguplodaan disesuaikan;

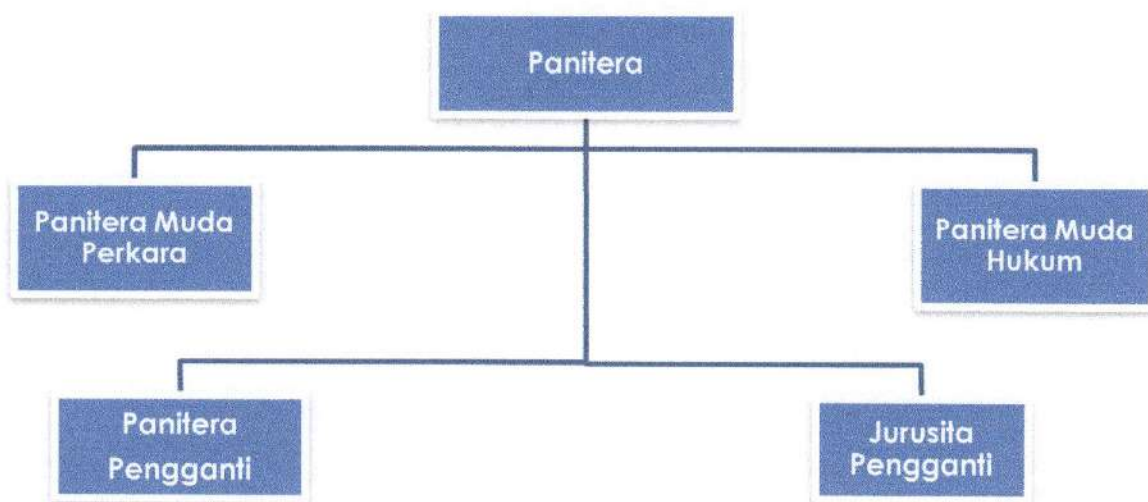
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

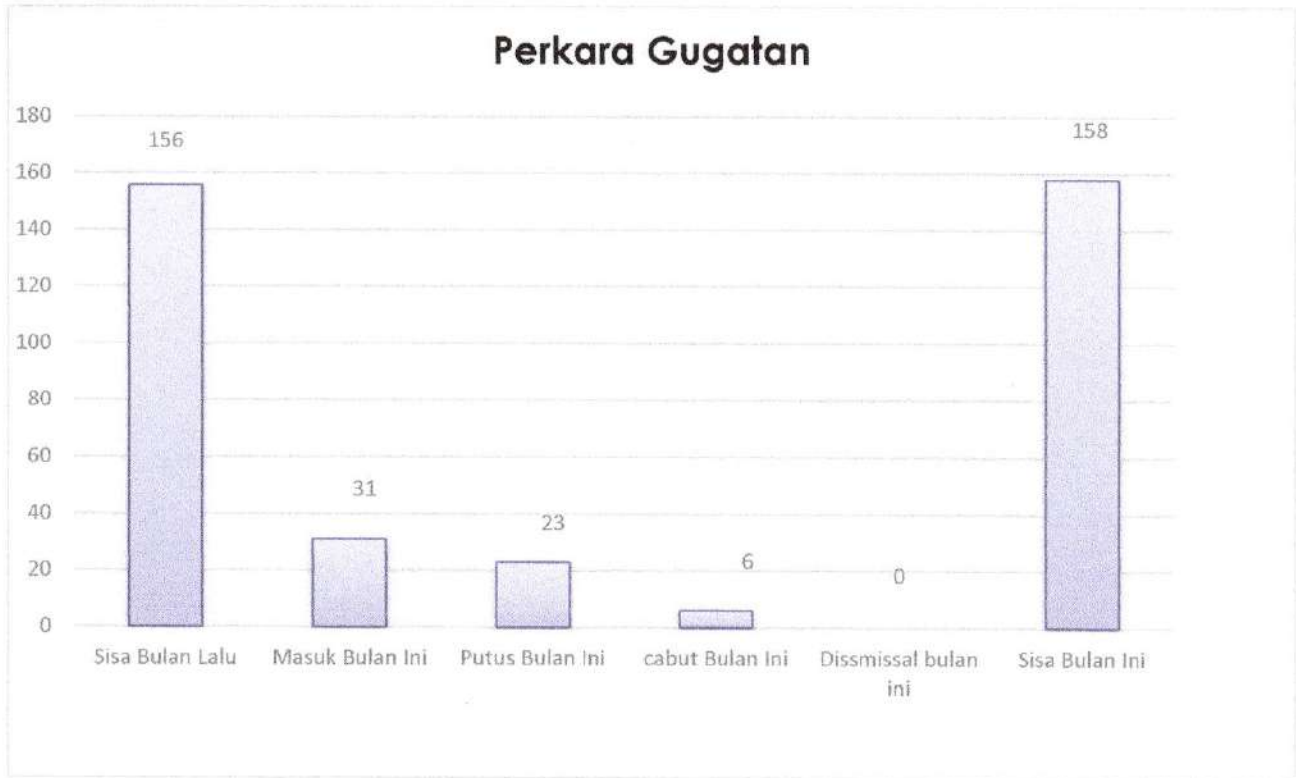
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

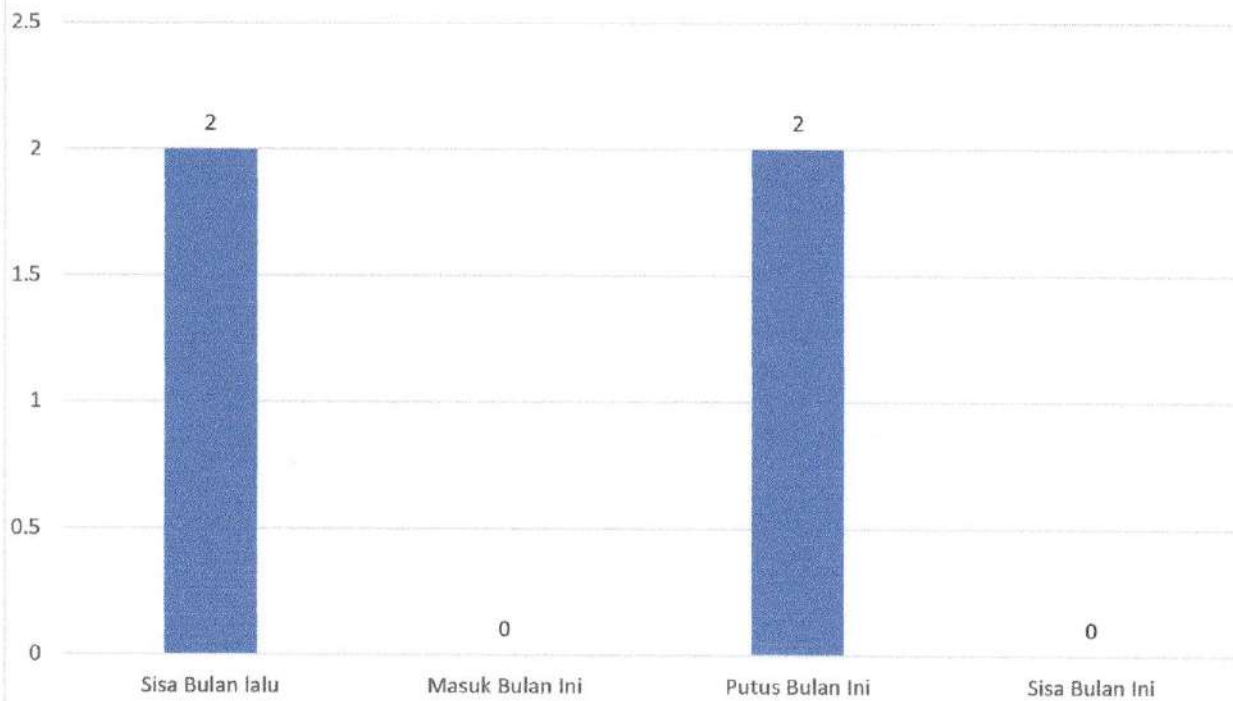
Keadaan Perkara



Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $6 + 0 + 23 = 29$ Perkara

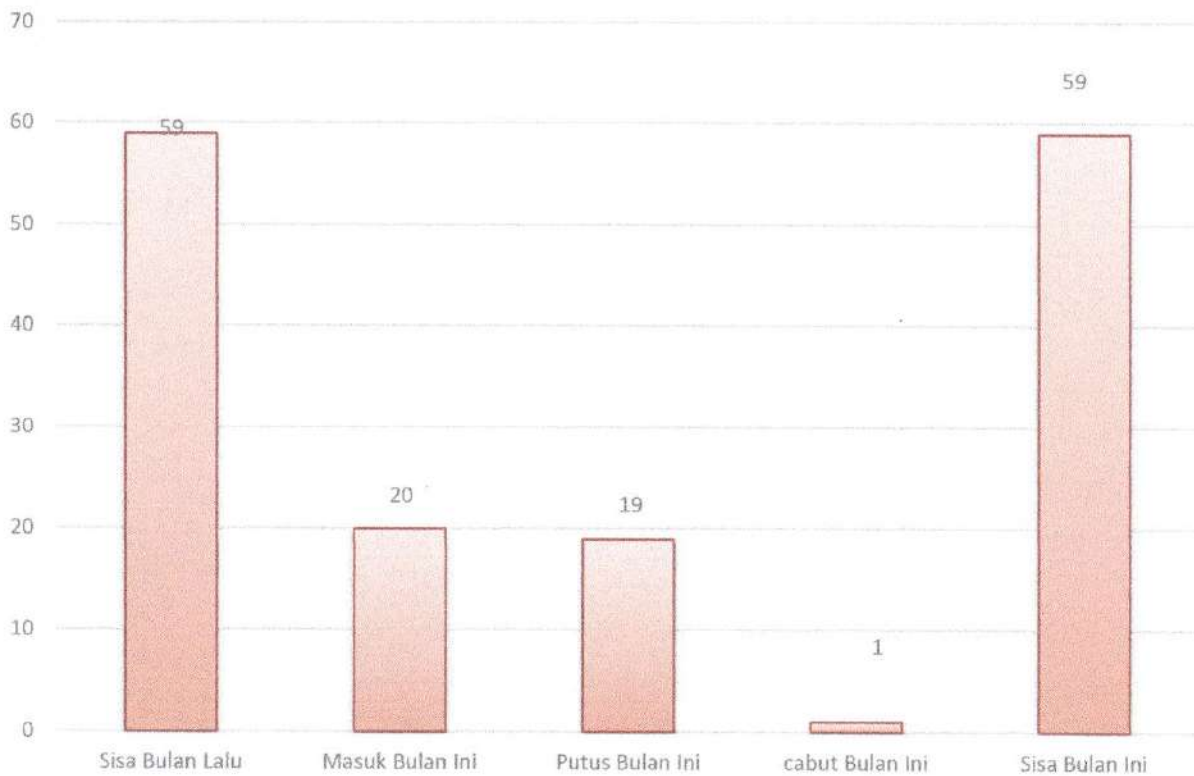
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan



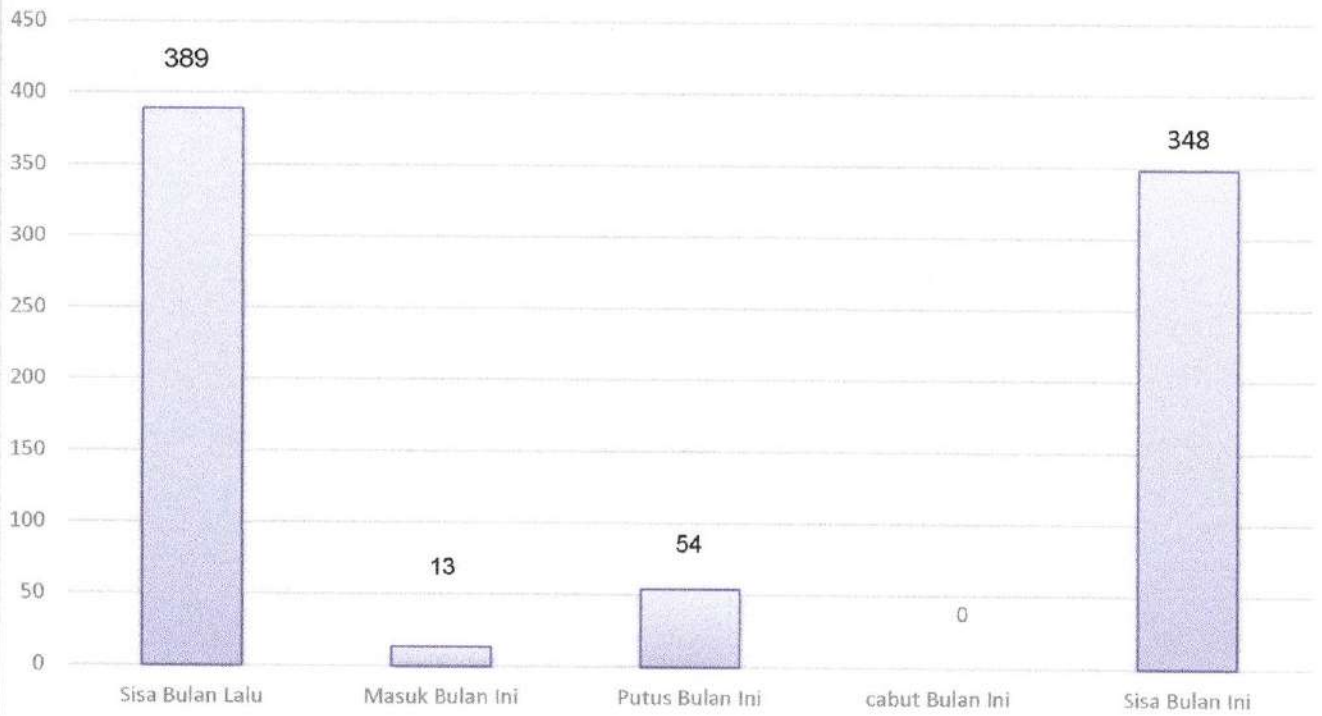
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Kasasi



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Desember 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
 Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 BULAN DESEMBER TAHUN 2024

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sta in Bulan Lalu	Perkara			Pengugat			tergugat			Perlawanan			Putusan					Permohonan			Tema Berkas		Keterangan				
			Masih	Selesai	Jumlah	Badan Hukum	Badan Hukum	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak	Orang/ Tidak					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
A	GUGATAN																												
1	Pertanahan	16	6	-	22	5	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	3	2	-	-	3	3	2	(Perkara Putus 1 PLW)	
2	Kepegawaian	3	2	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	-	3	-	-		
3	Perjinan	30	3	1	32	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	-	-	1	-	3	8	-		
4	Lingkungan Hidup	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Badan Hukum/ Parpol	30	4	1	33	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	1	2	-	-	3	3	-		
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Penggunaan Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KOP	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fiksf Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	25	10	-	35	4	6	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	30	6	4	6	1	7	38	1
17	Merek	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Lain Lain	42	6	-	48	5	1	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	43	8	4	-	1	1	2	1
	JUMLAH	156	31	2	186	17	14	19	12	-	1	-	-	4	3	15	4	27	158	20	13	7	2	28	54	4			

MENGETAHUI



Jakarta, 31 DESEMBER 2024
 KEPANITERAAN



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Desember 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
 Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 BULAN DESEMBER TAHUN 2024

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 31 DESEMBER 2024



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

- Pada tanggal 9 Desember 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta meraih kembali sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) bertempat di Balai Rung gedung Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan Hasil penilaian terhadap satuan kerja dalam tahap Evaluasi II. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lembaga peradilan. SMAP merupakan sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons penyuapan serta mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan dari ISO 37001:2016 dengan menambahkan prosedur dan syarat yang sesuai dengan kekhasan pengadilan. Pada moment ini Mahkamah Agung mengapresiasi satuan kerja yang telah membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui penyerahan Sertifikat SMAP kepada satuan kerja salah satunya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta .



BAB III TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 86 ASN, 2 Orang CPNS, 11 PPNPN, dan 1 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP dan 1 (satu) JS yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

BAB IV KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Desember 2024 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

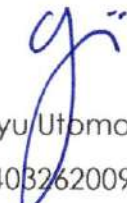
- Mohon agar diberikan Anggaran untuk renovasi rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).
- Mohon agar diberikan Anggaran Belanja Modal untuk keperluan Pengadaan Scanner dan PC untuk bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Jakarta, 16 Januari 2025





Mengetahui
Ketua,

Cendek Pratiwi, SH, MH
NIP. 197210261992032001

Sekretaris,


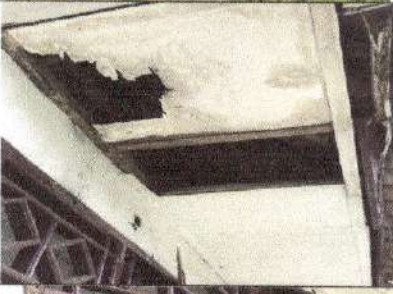





Giri Wahyu Utomo, S.Kom
NIP. 198403262009041004

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		




Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Komponen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					